

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN RUTIN PADA BADAN  
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MINAHASA**



**OLEH :**

**DAVID TUBERTA SARONITEMA ZEBUA**

**17304096**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**Program Studi: Akuntansi  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MANADO  
2021**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>5</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah</b> .....	<b>8</b>
<b>1.3 Pembatasan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian</b> .....	<b>10</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
<b>2.1 Landasan Teori</b> .....	<b>11</b>
2.1.1 Pengertian Analisis .....	11
<b>2.2 Laporan Keuangan</b> .....	<b>11</b>
2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	11
2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan .....	12
2.2.3 Komponen Laporan Keuangan.....	13
<b>2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )</b> .....	<b>14</b>
2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).....	14
2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ).....	15
<b>2.4 Laporan Realisasi Anggaran Publik</b> .....	<b>18</b>
2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik .....	18

2.4.2	Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik.....	19
2.4.3	Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik .....	20
2.4.4	Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik.....	22
<b>2.5</b>	<b>Pengendalian Internal.....</b>	<b>23</b>
2.5.1	Tujuan Pengendalian Internal.....	24
2.5.2	Komponen Pengendalian Internal .....	24
<b>2.6</b>	<b>Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>25</b>
<b>2.7</b>	<b>Kerangka Berfikir.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>32</b>
<b>3.1</b>	<b>Metode yang Digunakan.....</b>	<b>32</b>
<b>3.2</b>	<b>Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian .....</b>	<b>32</b>
3.2.1	Variabel Penelitian .....	32
3.2.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	32
<b>3.3</b>	<b>Desain Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.4</b>	<b>Populasi dan Sampel.....</b>	<b>33</b>
<b>3.5</b>	<b>Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>33</b>
<b>3.6</b>	<b>Sumber Data.....</b>	<b>34</b>
<b>3.7</b>	<b>Teknik Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
3.7.1	Rasio Efektifitas .....	35
3.7.2	Rasio Efisiensi .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>36</b>
<b>4.1</b>	<b>Deskripsi Lokasi Penelitian.....</b>	<b>36</b>
4.1.1	Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa .....	37
4.1.2	Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa .....	38

<b>4.2 Hasil Penelitian.....</b>	<b>40</b>
4.2.1 Penjelasan Kasus .....	40
4.2.2 Penyajian Data Penelitian.....	40
4.2.3 Analisis Data Penelitian .....	47
<b>4.3 Pembahasan.....</b>	<b>51</b>
4.3.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas. ....	51
4.3.2 Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efisiensi.....	53
4.3.3 Pengendalian Internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa .....	55
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>58</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaporan keuangan merupakan salah satu agenda untuk memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan bersama. Dalam penyajian laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah, komponen laporan keuangan harus dipenuhi. Laporan realisasi anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, Laporan realisasi anggaran yang disusun oleh badan utama menyampaikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan standar untuk mengatur bagaimana laporan realisasi anggaran harus disajikan.

Tujuan penetapan standar laporan pencapaian anggaran adalah untuk menentukan dasar bagi pemerintah dalam menyajikan laporan pencapaian anggaran dalam rangka pencapaian tujuan akuntabilitas publik. Dengan menyusun laporan realisasi anggaran, informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor dapat dihasilkan. Berdasarkan informasi tersebut maka dapat dilakukan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran, perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang disepakati antara eksekutif dan legislatif serta bagaimana proses penyerapan anggaran berlangsung. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah di masa mendatang dengan memperkenalkan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat melaporkan kepada pengguna informasi tentang tanda-tanda perolehan dan penggunaan sumber daya

ekonomi. Rambu-rambu tersebut telah dilaksanakan secara efektif, efektif dan ekonomis, telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran (APBN / APBD), dan telah dilaksanakan di sesuai dengan peraturan Anggaran Dasar.

Informasi laporan realisasi anggaran (LRA) sangat berguna untuk mereview keputusan tentang alokasi sumber daya ekonomi, pertanggungjawaban dan pelaporan apakah entitas memenuhi kebutuhan anggaran, kemudian hasil akhir laporan realisasi anggaran akan ditransfer ke neraca keuangan. Pada kelompok ekuitas dana saat ini, setiap laporan realisasi anggaran harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). LRA dan SAP diatur dalam PSAP No. 2 terkait laporan realisasi anggaran. PSAP tersebut memuat prinsip-prinsip LRA serta regulasi. Lahirnya Undang-Undang (UU) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Resolusi Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan titik awal otonomi daerah. Otonomi daerah (otoda) adalah kewenangan daerah otonom untuk mengurus dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keinginan masyarakat, dan inisiatif sendiri. Pada saat yang sama, perimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah bersifat regional, dan pemerataan daerah merata secara proporsional, demokratis, adil dan transparan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah tersebut, serta pembagian tanggung jawab dan wewenang yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan, maka dengan adanya undang-undang ini memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan segala urusan pemerintahan, termasuk perencanaan, pengendalian,

dan pengawasan. dan evaluasi, sehingga mendorong pemerintah daerah untuk lebih memberdayakannya untuk mengembangkan dan mengembangkan seluruh potensi daerahnya. Padahal, dasar pertimbangan diadakannya otoda adalah pembangunan dalam negeri yang menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perangkat kebijakan utama pemerintah daerah. Sebagai alat kebijakan, APBD mendukung posisi pusat dalam mengembangkan kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD dapat digunakan untuk menentukan besaran pendapatan dan belanja, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otorisasi belanja di masa mendatang, sumber perumusan ukuran standar evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi untuk semua kegiatan. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah daerah adalah memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk membuktikan tanggung jawab pemerintah daerah atas sumber yang dipercayakan. Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah untuk menilai apakah telah berhasil melaksanakan tugasnya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan menganalisis rasio keuangan terhadap APBD yang dilaksanakan.

Menurut Kaban BPKAD Kabupaten Minahasa Donald Wagey Di tengah pandemi Covid-19, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa, tetap mengoptimalkan kinerja. Kepala BPKAD Donald

Wagey mengatakan pihaknya tetap terus mengoptimalkan kinerja sembari tetap memperhatikan standart operasional sesuai anjuran pemerintah di tengah Covid-19. Jalannya pemerintahan Kabupaten Minahasa khususnya di bidang keuangan menurut Wagey tak boleh terbengkala “Saat ini kami juga sedang menyusun untuk pemberian bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat kurang mampu di Minahasa,.( ManadoPost.com).

**Tabel 1. 1 Laporan Realisasi Anggaran Tahunan**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>
2016	1.307.154.121.966	1.314.065.101.716
2017	1.195.337.150.000	1.276.079.815.204
2018	1.240.173.197.898	1.267.974.996.960
2019	1.332.541.938.509	1.300.024.724.183

Sumber Data: Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Minahasa ( Data diolah )

Dari tabel di atas menunjukkan perkembangan anggaran belanja terhadap realisasi pendapatan pada Minahasa secara rutin dimana anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan dan penurunan sehingga hal tersebut menarik minat peneliti untuk menganalisis realisasi anggaran rutin yang terjadi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah khususnya didaerah Kabupaten Minahasa

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah berdasarkan pada latar belakang masalah di atas adalah sebagai analisis realisasi anggaran rutin tahun pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis realisasi anggaran rutin tahun pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten Minahasa tahun 2016 – 2019 melalui dua rasio yakni rasio efektifitas dan efesiensi serta melihat apakah terdapat pengendalian internal didalamnya. Data yang diambil yaitu Laporan anggaran rutin pada Kabupaten Minahasa

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang serta fokus penelitian masalah diatas, maka rumusan permasalahan penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa yang sudah dianggarkan secara rutin jika dianalisis ?
2. Apakah terdapat pengendalian internal yang dilakukan secara rutin untuk mengontrol realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa ?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian kali ini adalah untuk :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan pada realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa yang sudah dianggarkan secara rutin

2. Untuk mengetahui pengendalian internal yang dilakukan secara rutin untuk mengontrol realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. **Bagi Peneliti**, diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dalam menganalisis Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa dalam mengelola realisasai anggaran
2. **Bagi Peneliti Lain**, diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif.
3. **Bagi Universitas Negeri Manado** penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Manado yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa di masa yang akan datang

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dsb) (KBBI, 2008: 58). Analisis berasal dari kata Yunani kuno "analisis" yang artinya melepaskan. Analisis terdiri dari dua suku kata, yaitu "ana" yang artinya kembali dan "luein" yang artinya melepaskan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan analisis adalah upaya mengamati suatu hal atau objek secara detail dengan mendeskripsikan komponen-komponen penyusunnya atau menyusun elemen-elemen tersebut untuk penelitian selanjutnya. Menurut Gorys Keraf, analisis adalah proses memecah sesuatu menjadi bagian-bagian yang terkait satu sama lain. Sedangkan menurut Komarrudin, ia mengatakan bahwa analisis adalah tindakan memecah secara utuh menjadi komponen-komponennya sehingga dapat mengenali tanda-tanda dari masing-masing unsur, keterkaitan satu sama lain, dan fungsi masing-masing secara utuh

#### **2.2 Laporan Keuangan**

##### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011: 1), "Pelaporan keuangan adalah pernyataan terstruktur tentang status keuangan dan kinerja suatu entitas". Sedangkan menurut Harahap (2010: 105), "Laporan keuangan menggambarkan status keuangan perusahaan dan hasil operasi pada waktu atau periode tertentu."

Menurut Agnes Sawir (2005: 5) memahami laporan keuangan, "Laporan keuangan adalah proses melihat hasil akhir dalam proses pencatatan akuntansi. Setiap transaksi yang dapat berharga dicatat dan diproses dengan cara ini. Laporan akhir juga bernilai ". Sedangkan menurut Munawir (2008: 5), laporan keuangan diartikan sebagai "dua daftar yang disiapkan oleh akuntan pada akhir periode. Kedua daftar tersebut adalah neraca atau daftar status keuangan, dan daftar pendapatan atau pendapatan.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikemukakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterapkan secara konsisten dan merupakan salah satu alat pertanggungjawaban dan komunikasi dengan pihak yang membutuhkan.

### **2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan**

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2011: 1.5-1.6) adalah sebagai berikut: "Untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan. dalam keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan dampak pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Kemudian Dwi Prastowo (2011: 5-6) menambahkan bahwa: "Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja dan perubahan kondisi keuangan suatu perusahaan, untuk kepentingan banyak pemakai bila membuat keputusan bisnis. Jika informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan diperlukan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

kas dan setara kas dan waktu untuk memperoleh kepastian berdasarkan hasil tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang entitas yang meliputi: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dan pembayaran kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Informasi ini, bersama dengan informasi lain yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian perolehan kas dan setara kas.

### **2.2.3 Komponen Laporan Keuangan**

Berdasarkan pernyataan Ikatan Akuntan Indonesia (2011: 1.4-1.5), unsur-unsur laporan keuangan yang lengkap meliputi :

1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode

Neraca adalah laporan sistematis atas aset, hutang dan ekuitas saat itu.

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode tersebut

Jumlah pendapatan komprehensif adalah perubahan ekuitas selama 1 (satu) periode yang diakibatkan oleh transaksi dan peristiwa lain, selain perubahan akibat transaksi dengan pemilik yang bertindak sebagai pemilik.

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas, yang menunjukkan:

- a) Total pendapatan komprehensif periode tersebut, yang secara terpisah menunjukkan jumlah total yang dapat dipecah menjadi pemilik entitas induk dan non kepentingan pengendali,

- b) komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif, diakui sesuai dengan PSAK 25.
- c) Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan perubahan relevan yang dihasilkan dari Laba atau rugi, Pos penghasilan komprehensif lainnya, Transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik yang secara terpisah mewakili kontribusi dari pemilik dan pembayaran kepada pemilik, dan perubahan kepemilikan pada anak perusahaan yang tidak mengakibatkan hilangnya kendali.

#### 4. Laporan arus kas untuk periode

Informasi arus kas merupakan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan untuk menilai kebutuhan entitas untuk memanfaatkan arus kas tersebut.

#### 5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan tentang apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan laba rugi tersendiri (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )**

#### **2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun Anggaran APBD

meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Anggaran belanja yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

### **2.3.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah terakhir kali dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ada enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunan APBD yaitu:

#### **1. Fungsi Otorisasi**

Anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Otorisasi sendiri mempunyai makna “pemberian kekuasaan”, hal ini jikadikaitkan dengan APBD, seseorang atau satuan kerja diberi kekuasaan untuk melaksanakan setiap anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah dianggarkan dalam APBD. Bagi SKPD yang menganggarkan pendapatan dan telah ditampung dalam APBD, sudah seharusnya mengupayakan seoptimal mungkin untuk merealisasikan pendapatan yang menjadi tanggung jawab SKPD tersebut. Dengan demikian sumber-sumber pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mendanai sisl belanja yang juga telah dianggarkan dalam APBD

#### **2. Fungsi Perencanaan**

Anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Melaksanakan suatu kegiatan apabila

sejak awal telah direncanakan maka diharapkan akan meminimalkan hambatan dalam pelaksanaannya. Ketika APBD telah ditetapkan, menjadi kewajiban setiap penggunaan anggaran untuk membuat anggaran kas agar kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Dalam hal ini tentu saja dengan memperhatikan cash inflow dan ketersediaan uang kas di kas daerah. Kerja sama dan hubungan yang harmonis antar kepala SKPD dan SKPKD dalam menyusun anggaran kas akan memberikan kontribusi positif atas terlaksananya kegiatan secara tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian diharapkan tidak lagi terdengar keluhan dari masyarakat seperti penyediaan fasilitas umum pelayanan dasar yang terlambat dengan alasan dana belum tersedia dan belum dapat dicairkan.

### 3. Fungsi Pengawasan

Dokumen perda tentang APBD memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Terhadap program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD tersebut merupakan implementasi dan pelaksanaan atas urusan pemerintahan yang telah diserahkan dari pusat kepada daerah baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan.

### 4. Fungsi Alokasi

Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta dan juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Penyusunan program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam APBD supaya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja, sehingga pada akhirnya secara signifikan akan mengurangi pengangguran di daerah yang bersangkutan.

Pada dasarnya APBD merupakan government expenditure pada tingkat lokal, yang secara teoritis akan menciptakan multiplier effect pada pertumbuhan ekonomi. APBD yang dikelola dan dilaksanakan dengan baik tentu akan mengoptimalkan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas ekonomi yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

#### 5. Fungsi Distribusi

Kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam kaitan ini, sering terdengar istilah yang dilontarkan para pakar maupun orang awam bahwa APBD adalah uang rakyat. Jika APBD adalah benar uang rakyat, sudah seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah yang bersangkutan. Dalam penerapan fungsi distribusi perancangan APBD harus lebih mengutamakan kegiatan-kegiatan yang output-nya dapat dinikmati oleh masyarakat. Masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama dalam mengakses manfaat output dari proses kegiatan yang didanai dari uang rakyat tersebut.

#### 6. Fungsi Stabilisasi

Anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Pengimplementasian fungsi stabilisasi dapat melalui kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD. Alokasi anggaran belanja subsidi diberikan kepada lembaga/perusahaan yang memproduksi barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Subsidi ini pada dasarnya diberikan untuk bantuan biaya produksi pada lembaga/perusahaan. Dengan diberikannya subsidi tersebut

keuntungan perusahaan tidak akan berkurang namun harga barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dengan kebijakan pengalokasian belanja subsidi dalam APBD maka daya beli masyarakat akan semakin baik dan penghasilannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

#### **2.3.2.1 Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )**

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri atas :
  - a) Dana Darurat.
  - b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
  - c) Dana Penyesuaian.
  - d) Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah lainnya.
  - e) Lain-lain pendapatan yang sah.
  - f) Anggaran Belanja
  - g) Pembiayaan.

### **2.4 Laporan Realisasi Anggaran Publik**

#### **2.4.1 Pengertian Laporan Realisasi Anggaran Publik**

Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan

realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja.

Laporan realisasi anggaran yang disusun dalam laporan keuangan akan dijelaskan secara rinci dalam suatu catatan atas laporan keuangan. Penjelasan tersebut akan memuat informasi-informasi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka - angka yang perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Selain itu, laporan realisasi anggaran juga memberikan informasi tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, sesuai dengan anggaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **2.4.2 Tujuan Laporan Realisasi Anggaran Publik**

Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan dan menetapkan dasar – dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian

target – target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksikan sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah. Laporan tersebut juga memprediksi resiko ketidakpastian dari sumber – sumber daya ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah tersebut. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi apakah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan digunakan :

- a. Telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat.
- b. Telah sesuai dengan anggarannya.
- b. Telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### **2.4.3 Komponen Laporan Realisasi Anggaran Publik**

##### **1. Pendapatan LRA**

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga pendapatan LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas umum Negara/Daerah. Pembukuan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat notenyanamun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

## 2. Belanja

Belanja adalah pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran (allotment). Belanja disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut.

Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran. Pembayaran diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dana kas kecil digunakan pemerintah untuk membayar keperluan sehari – hari kantor. Pada dasarnya pemerintah menggunakan sistem dana tetap.

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama.

## 3. Surplus /Defisit - LRA

Surplus – LRA adalah selisih lebih antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit – LRA adalah selisih kurang antara pendapatan – LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit – LRA. Perhitungan surplus/defisit – LRA dilakukan di tingkat pemerintah pusat atau daerah melalui jurnal penutup pada saat dilakukan proses konsolidasi.

#### 4. Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun bertahun – tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran publik terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi publik, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan asas bruto. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah.

#### 5. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)

Selisih lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA/SiKPA diperoleh dari penutupan akun Surplus/Defisit dan pembiayaan neto pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **2.4.4 Manfaat Analisis Realisasi Anggaran Sektor Publik**

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.

- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
- c. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

## 2.5 Pengendalian Internal

AICPA (American Institute of Certified Public Accountants, 2006: 11.4) mendefinisikan pengendalian internal adalah untuk melindungi aset, menjaga keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepatuhan dengan strategi manajemen." Dalam buku Winarno (2006: 11.5), definisi pengendalian internal menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations) adalah bentuk pengendalian yang dilaksanakan oleh direksi, manajemen dan lembaga lain. Di bawah bimbingan dan pengawasan memberikan jaminan yang wajar untuk memastikan keefektifan dan penambahan operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan untuk mencapai tujuan pengendalian.

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal adalah suatu kegiatan penangkalan risiko-risiko untuk meminimalisir kerugian yang mungkin timbul dari suatu aktivitas perusahaan sehingga dapat langsung diambil sebuah tindakan dengan tujuan peningkatan kualitas perusahaan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.5.1 Tujuan Pengendalian Internal**

Menurut Mulyadi (2014: 163), tujuan pokok pengendalian internal yaitu sebagai berikut:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Selanjutnya, tujuan pengendalian internal menurut Winarno (2006: 11.6) ada empat yaitu :

1. Melindungi harta kekuasaan perusahaan
2. Meningkatkan akurasi informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang dijalankan oleh perusahaan
3. Meningkatkan efisiensi kinerja perusahaan, sehingga dalam berbagai kegiatan dapat dilakukan penghematan
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen

### **2.5.2 Komponen Pengendalian Internal**

Komponen pengendalian internal menurut COSO dalam buku Winarno (2006: 11.7), yaitu:

1. Lingkungan pengendalian atau control environment Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana suatu organisasi atau perusahaan untuk menjalankan sistem pengendalian intern yang baik. Tanpa adanya lingkungan pengendalian internal yang baik, sistem pengendalian intern yang sangat bagus pun tidak dapat dijalankan dengan baik.

2. Kegiatan pengawasan atau control activities Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Pemahaman resiko atau risk assessment Manajemen perusahaan harus bisa mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kerugian-kerugian yang mungkin timbul.
3. Informasi dan komunikasi atau information and communication Perusahaan harus mengetahui tugas masing-masing karyawan, contohnya karyawan yang mencatat transaksi penjualan, mengirim tagihan kepada pembeli dan yang menerima uang pembayaran. Hal tersebut dilakukan agar perusahaan dapat melacak karyawan yang cenderung untuk melakukan kecurangan.
4. Pemantauan atau monitoring Pemantauan adalah ketika suatu kegiatan berjalan tidak sesuai apa yang diharapkan dapat diambil tindakan secepatnya.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	TAHUN	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1.	Waney et al	2018	Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah di	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kriteria efektivitas yang bervariasi dari tahun ke tahun, dari yang cukup efektif

			<p>Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara</p>	<p>sampai mengalami peningkatan yang efektif. Pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya adalah 89,93%, tahun 2013 tingkat efektivitasnya 94,61%, tahun 2014 tingkat efektivitasnya 93,78%, tahun 2015 tahun efektivitasnya 90,57%, dan tahun 2016 tingkat efektivitasnya 94,98%. Jadi secara keseluruhan dari tahun 2012-2016 tingkat efektivitas anggaran belanja Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan yang baik. Tingkat atau kriteria efisiensi Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012-2016, secara keseluruhan sudah diolah dengan baik, dimana pada tahun 2012 tingkat efisiensi 40,19%, tahun 2013 tingkat efisiensi</p>
--	--	--	---	--

				<p>56,53%, tahun 2014 tingkat efisiensi 45,51%, tahun 2015 tingkat efisiensi 40,78%, dan tahun 2016 tingkat efisiensi 57,70%. Jadi anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara sudah memiliki kriteria yang sangat efisien, karena tingkat efisiensi semua berada dibawah 60%. Pengelolaan anggaran belanja ini sudah berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.</p>
2.	Kiky Muryanti	2017	<p>Analisis Realisasi Anggaran untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Pemerintah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangannya sangat efektif dan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan efisien.</p>

			Daerah Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015	
3.	AstriaNur Jannah Dien,Jantje Tinangon, Stanley Walandouw	2015	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah di Dinas Pendapatan Kota Bitung tahun anggaran 2009-2013 sangat efektif dari tahun ke tahun. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Bitung mampu memobilisasi penerimaan pendapatan asli daerah sesuai dengan yang ditargetkan dengan tingkat efektivitasnya diatas 100%. Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja Dinas Pendapatan Kota Bitung tahun anggaran 2009-2013 secara

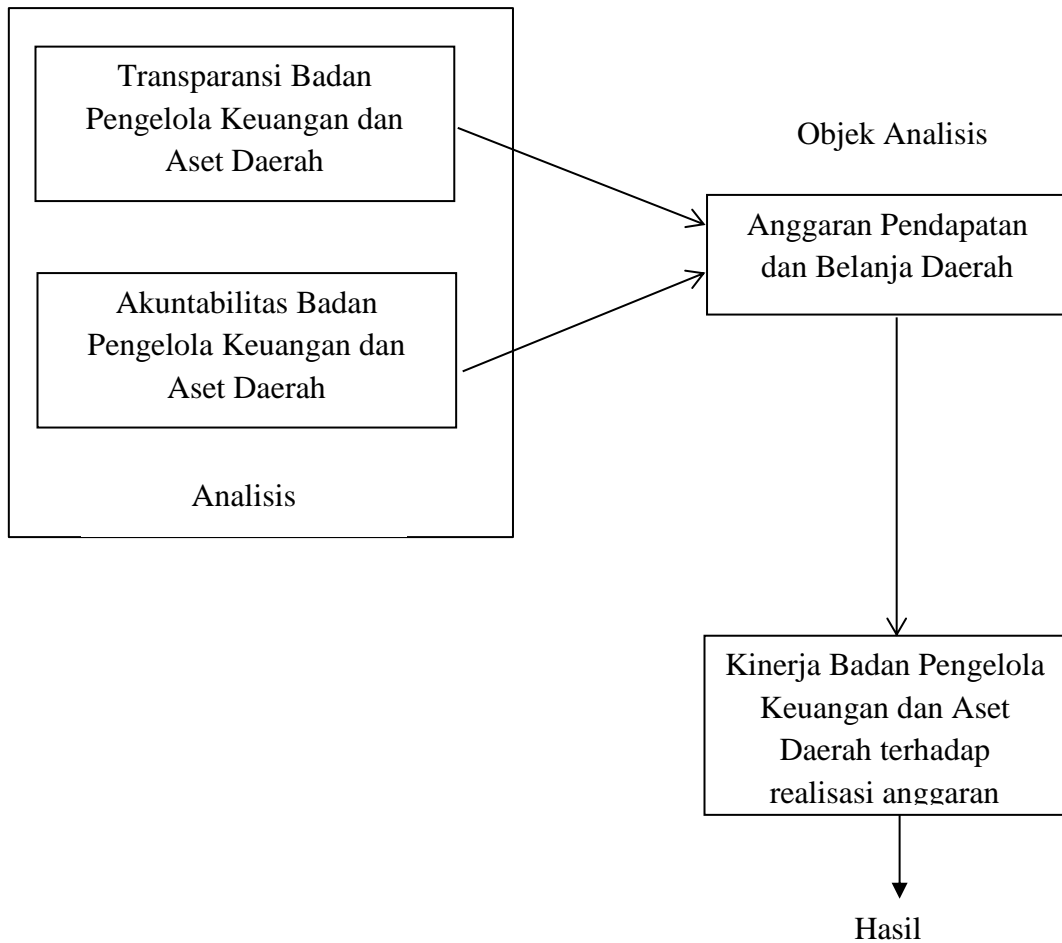
				keseluruhan kurang efisien dari tahun ke tahun. Dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Kota Bitung kurang mengefisiensikan penggunaan anggaran belanja sesuai yang ditargetkan dengan tingkat efisiensi yang hampir mendekati 100%.
4.	Abdurrohman Wiro Handoko	2014	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Dispenda Kota Surabaya dalam tingkat efektif dan efisien pada tahun 2011-2012

5.	Ariel Sharon Sumenge	2013	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran belanja BAPPEDA Minahasa Selatan 2008-2011 dikatakan efektif dan efisien
----	-------------------------	------	---	--

## 2.7 Kerangka Berfikir

Laporan realisasi anggaran yang disebut dengan LRA merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri atas unsur pendapatan dan belanja. Pengukuran kinerja sangatlah penting dalam suatu organisasi sektor publik karena dapat membantu manajer publik dalam menilai pencapaian dalam suatu strategi. Ukuran finansial dan nonfinansial merupakan hal yang penting dalam pengukuran kinerja pada sektor publik karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bukan untuk memperoleh laba,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa merupakan salah satu organisasi sektor publik yang membutuhkan kegiatan pengukuran kinerja karena dapat mengetahui kinerja secara menyeluruh didalam melaksanakan program kerjanya, sehingga kerangka berfikir yang akan penulis gunakan sebagai bentuk kerangka awal penelitian ini adalah sebagai berikut :



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode yang Digunakan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Sedangkan pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

#### **3.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian**

##### **3.2.1 Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen disini adalah rasio efektifitas serta rasio efisiensi.

##### **3.2.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian**

Definisi operasional merupakan acuan dasar teori dalam melakukan penelitian, dimana variabel dapat dihubungkan satu sama lain sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata-kata yang dibutuhkan. Adapun definisi operasi, pada penelitian ini adalah tingkat kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. sehingga dapat diartikan sebagai aktivitas

pengukuran suatu entitas dalam kurun waktu tertentu sebagai bagian dari pengukuran keberhasilan suatu pekerjaan.

### **3.3 Desain Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian analisis yang mana peneliti akan berfokus pada penelitian yang berbasis analisis. Data yang akan peneliti analisis adalah bentuk laporan realisasi anggaran yang didapatkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, melalui dua rasio yakni rasio efektifitas dan juga rasio efesiensi, serta melihat apakah telah terdapat pengendalian internal yang baik laporan realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. Sementara kriteria penarikan sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa selama 4 tahun, dari tahun 2016 sampai 2019.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah menggunakan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mencatat atau menyalin dokumen-dokumen maupun data lain yang terkait dengan masalah yang di teliti oleh penulis dan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan analisis bentuk laporan realisasi anggaran yang didapatkan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2016-2019, serta menggunakan Metode Kepustakaan untuk mencari serta mencocokkan teori yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis serta bahan-bahan lain seperti

materi perkuliahan, jurnal akuntansi dan skripsi, penelitian Pustaka yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan meneliti literatur yang ada baik berupa buku, makalah penelitian, jurnal atau artikel terkait, serta mengakses website dan website yang memuat informasi. terkait dengan masalah penelitian.

### **3.6 Sumber Data**

Dalam penelitian ini diperlukan data atau keterangan dan informasi sehingga diperlukan pengambilan data untuk memunjang hasil penelitian. Secara umum sumber data utama yang digunakan pada penelitian adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang diperlukan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Rutin tahun 2016 – 2019 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja terhadap realisasi anggaran yang dibutuhkan, serta apakah sudah terdapat pengendalian internal didalamnya.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis data menurut Sugiyono (2013:244) adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu analisis realisasi anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

Berikut merupakan teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini :

### 3.7.1 Rasio Efektifitas

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi pendapatan dengan nilai anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

### 3.7.2 Rasio Efisiensi

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang digunakan (realisasi belanja) terhadap input yang dihasilkan (realisasi pendapatan). Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif. Berikut Rumus yang digunakan untuk menghitung laporan secara rasio efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian**

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

Materi yang merupakan muatan baru dalam UU Nomor 16 Tahun 1997, antara lain :

1. Jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS.
2. Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam Berita Resmi Statistik (BRS) secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan atau mendapatkan data yang diperlukan.
3. Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.
4. Dibentuknya Forum Masyarakat Statistik sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik, yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada BPS.

Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, peranan yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder
2. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

#### **4.1.1 Visi dan Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa**

##### a. Visi

“Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”

##### b. Misi

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

#### 4.1.2 Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa



##### → Deskripsi

Susunan organisasi BPS Kabupaten Minahasa terdiri dari:

1. Kepala;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Statistik Sosial;
4. Seksi Statistik Produksi;
5. Seksi Statistik Distribusi;
6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
8. Fungsional dan KSK;

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

- Tugas

Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.

- Fungsi

1. Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

- Kewenangan

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu;Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik dan Penyusun pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Penjelasan Kasus

Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Analisis tersebut dimaksudkan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Kinerja keuangan diukur dengan melihat rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dikatakan efektif apabila rasio efektivitas menunjukkan nilai  $\geq 100\%$ . Kemudian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dikatakan efisien apabila rasio efisiensi menunjukkan nilai  $< 100\%$ .

### 4.2.2 Penyajian Data Penelitian

Berikut merupakan data – data penelitian yang diperlukan dalam analisis Laporan Realisasi Anggaran.

#### 1. Tahun 2016

<b>AKUN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>1.307.154.121.966</b>	<b>1.314.065.101.716</b>
PAD	73.954.865.578	77.933.004.819
Pajak daerah	23.918.100.000	28.662.130.479
Retribusi daerah	30.084.904.378	24.378.942.411
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.515.000.000	2.008.394.417
Lain-lain PAD yang sah	16.436.861.200	22.883.537.512
Daper	883.630.830.306	977.670.435.526

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	25.536.498.306	22.592.435.526
Dana alokasi umum	668.382.482.000	668.382.000.000
Dana alokasi khusus	189.711.850.000	286.696.000.000
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	349.568.426.082	258.461.661.371
Hibah	-	49.317.288.666
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	31.934.921.082	35.515.372.705
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	317.633.505.000	173.629.000.000
<b>Belanja</b>	<b>1.333.332.719.912</b>	<b>1.322.939.724.000</b>
Belanja Tidak Langsung	831.786.743.534	812.289.724.000
Belanja Pegawai	614.715.782.534	583.112.000.000
Belanja Hibah	5.650.000.000	19.329.287.000
Belanja Bantuan sosial	-	417.500.000
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	5.400.810.000	4.850.937.000
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	204.520.151.000	204.580.000.000
Belanja tidak terduga	1.500.000.000	-
Belanja Langsung	501.545.976.378	510.650.000.000
Belanja Pegawai	8.742.074.980	-
Belanja Barang dan Jasa	203.931.577.848	209.494.000.000

Belanja Modal	288.872.323.550	301.156.000.000
---------------	-----------------	-----------------

2. Tahun 2017

AKUN	ANGGARAN	REALISASI
<b>Pendapatan</b>	<b>1.195.337.150.00</b>	<b>1.276.079.815.20</b>
	<b>0</b>	<b>4</b>
PAD	74.837.474.000	112.621.999.187
Pajak daerah	24.574.900.000	37.664.806.022
Retribusi daerah	25.395.982.000	27.916.525.146
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	2.000.000.000	2.649.484.945
Lain-lain PAD yang sah	22.866.592.000	44.391.183.074
Daper	872.895.286.000	890.058.712.453
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	18.632.168.000	22.873.358.205
Dana alokasi umum	668.382.482.000	656.641.151.000
Dana alokasi khusus	185.880.636.000	210.544.203.248
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	247.604.390.000	273.399.103.564
Hibah	863.200.000	1.987.000.000
Dana darurat	0	2.900.000.000
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	25.115.662.000	45.821.049.518
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	221.625.528.000	221.625.528.000

Lain-lain	0	1.065.526.046
<b>Belanja</b>	<b>1.210.263.593.70</b>	<b>1.272.422.425.68</b>
	<b>0</b>	<b>5</b>
Belanja Tidak Langsung	815.518.857.295	820.395.027.434
Belanja Pegawai	540.710.594.955	527.146.479.607
Belanja Hibah	25.161.200.000	44.602.271.245
Belanja Bantuan sosial	1.000.000.000	580.000.000
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	4.997.088.200	5.306.125.000
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	242.149.974.140	242.549.946.240
Belanja tidak terduga	1.500.000.000	210.205.342
Belanja Langsung	394.744.736.405	452.027.398.251
Belanja Pegawai	8.693.455.000	0
Belanja Barang dan Jasa	231.167.135.205	252.795.915.505
Belanja Modal	154.884.146.200	199.231.482.746

### 3. Tahun 2018

<b>AKUN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>
<b>Pendapatan</b>	<b>1.240.173.197.898</b>	<b>1.267.974.996.960</b>
PAD	89.161.647.000	94.590.405.094
Pajak daerah	33.479.000.000	40.954.428.429
Retribusi daerah	30.816.055.000	26.059.012.944
Hasil pengelolaan kekayaan daerah	2.000.000.000	4.154.979.062

yang dipisahkan		
Lain-lain PAD yang sah	22.866.592.000	23.421.984.659
Daper	916.096.197.000	911.587.605.152
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	26.831.004.000	28.833.211.585
Dana alokasi umum	656.641.151.000	656.641.151.000
Dana alokasi khusus	232.624.042.000	226.113.242.567
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	234.915.353.898	261.796.986.714
Hibah	23.984.800.000	22.109.400.000
Dana darurat	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	33.773.936.898	59.111.854.206
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	170.656.617.000	170.656.617.000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	5.000.000.000	3.750.000.000
Lain-lain	1.500.000.000	6.169.115.508
<b>Belanja</b>	<b>1.253.860.648.221</b>	<b>1.273.130.917.962</b>
Belanja Tidak Langsung	859.525.017.521	858.826.580.696
Belanja Pegawai	553.155.251.476	529.078.531.425
Belanja Bunga	-	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	74.861.428.045	92.668.477.334
Belanja Bantuan sosial	1.000.000.000	2.835.000.000

Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	6.429.505.500	6.290.493.100
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	222.078.832.500	222.228.804.350
Belanja tidak terduga	2.000.000.000	5.725.274.487
Belanja Langsung	394.335.630.700	414.304.337.266
Belanja Pegawai	8.968.870.000	-
Belanja Barang dan Jasa	245.891.562.490	257.285.526.995
Belanja Modal	139.475.198.210	157.018.810.271

#### 4. Tahun 2019

AKUN	ANGGARAN	REALISASI
<b>Pendapatan</b>	<b>1.332.541.938.509</b>	<b>1.300.024.724.183</b>
PAD	104.409.734.062	99.406.903.272
Pajak daerah	38.029.000.000	40.130.327.750
Retribusi daerah	37.145.555.000	27.228.137.670
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.154.979.062	5.417.363.563
Lain-lain PAD yang sah	25.080.200.000	26.631.074.289
Daper	934.207.375.000	906.083.472.525
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	32.449.320.000	27.390.817.922
Dana alokasi umum	688.302.010.000	680.344.043.000
Dana alokasi khusus	213.456.045.000	198.348.611.603

Lain-lain pendapatan daerah yang sah	293.924.829.447	294.534.348.386
Hibah	31.324.800.000	40.021.468.152
Dana darurat	-	-
Dana bagi hasil pajak dari Propinsi dan Pemda lainnya	60.578.156.447	52.491.007.234
Dana penyesuaian dan otonomi khusus	202.021.873.000	202.021.873.000
Bantuan keuangan dari Propinsi atau Pemda lainnya	-	-
Lain-lain	-	-
Pendapatan Lainnya	-	-
<b>Belanja</b>	<b>1.386.102.279.726</b>	<b>1.290.203.142.720</b>
Belanja Tidak Langsung	860.457.380.629	818.182.774.440
Belanja Pegawai	568.978.903.129	530.447.219.156
Belanja Bunga	1.025.000.000	-
Belanja Subsidi	-	-
Belanja Hibah	24.518.800.000	24.766.600.000
Belanja Bantuan sosial	12.200.000.000	13.280.090.000
Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	7.517.455.500	6.171.654.000
Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	243.217.222.000	243.517.211.284
Belanja tidak terduga	3.000.000.000	-
Belanja Lainnya	-	-

Belanja Langsung	525.644.899.097	472.020.368.280
Belanja Pegawai	5.436.317.000	316.045.000
Belanja Barang dan Jasa	348.920.250.795	325.553.329.206
Belanja Modal	171.288.331.302	146.150.994.074

### 4.2.3 Analisis Data Penelitian

Berdasarkan data penelitian yang disajikan dalam sub bab sebelumnya maka analisis data penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Efektivitas

Efektivitas kinerja anggaran sektor publik adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah di terapkan. Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan nilai realisasi pendapatan dengan nilai anggaran pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan adalah > 100%. Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin baik tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini pengukuran efektivitas kinerja keuangan daerah dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} \times 100\%$$

Dari rumus diatas, maka perhitungan rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2016

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.314.065.101.716}{1.307.154.121.966} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 1,00529 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 100,53\%$$

2. Tahun 2017

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.276.079.815.204}{1.195.337.150.000} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 1,06755 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 106,75\%$$

3. Tahun 2018

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.267.974.996.960}{1.240.173.197.898} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 1,02242 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 102,24\%$$

4. Tahun 2019

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{1.300.024.724.183}{1.332.541.938.509} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 0,97560 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektivitas} = 97,56\%$$

**Tabel 3. Efektivitas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran Pendapatan</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Efektivitas</b>	<b>Kesimpulan</b>
2016	1.307.154.121.966	1.314.065.101.716	100,53%	Sangat Efektif
2017	1.195.337.150.000	1.276.079.815.204	106,75%	Sangat Efektif
2018	1.240.173.197.898	1.267.974.996.960	102,24%	Sangat Efektif
2019	1.332.541.938.509	1.300.024.724.183	97,56%	Cukup Efektif

## 2. Efisiensi

Efisiensi kinerja anggaran sektor publik diukur dengan rasio antara output dan input. Pengukuran efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang digunakan (realisasi belanja) terhadap input yang dihasilkan (realisasi pendapatan). Efisiensi kinerja anggaran sektor publik lebih bersifat relatif.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan adalah < 100%. Semakin kecil nilai rasio yang dihasilkan, maka semakin baik tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini pengukuran efisiensi kinerja keuangan daerah dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Dari rumus diatas, maka perhitungan rasio efisiensi kinerja keuangan Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2019 adalah sebagai berikut.

1. Tahun 2016

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.322.939.724.000}{1.314.065.101.716} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 1,0068 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 100,68\%$$

2. Tahun 2017

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.272.422.425.685}{1.276.079.815.204} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,9971 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 99,71\%$$

3. Tahun 2018

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.273.130.917.962}{1.267.974.996.960} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 1,0041 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 100,41\%$$

4. Tahun 2019

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{1.290.203.142.720}{1.300.024.724.183} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 0,9924 \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = 99,24\%$$

**Tabel 4. Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Kabupaten Minahasa**

<b>Tahun</b>	<b>Realisasi Belanja</b>	<b>Realisasi Pendapatan</b>	<b>Efisiensi</b>	<b>Kesimpulan</b>
2016	1.322.939.724.000	1.314.065.101.716	100,68%	Tidak Efisien
2017	1.272.422.425.685	1.276.079.815.204	99,71%	Kurang Efisien
2018	1.273.130.917.962	1.267.974.996.960	100,41%	Tidak Efisien
2019	1.290.203.142.720	1.300.024.724.183	99,24%	Kurang Efisien

### 4.3 Pembahasan

#### 4.3.1 Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efektivitas.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar tingkat realisasi pendapatan pemerintah daerah terhadap target yang seharusnya dicapai. Pemerintah daerah menetapkan adanya anggaran pendapatan dimaksudkan untuk mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai pendapatan yang tinggi. Menurut hasil perhitungan, dapat dilihat pada tabel 3 rasio efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2019 menunjukkan nilai  $> 100\%$ .

Pada tahun 2016 pemerintah daerah Kabupaten Minahasa menetapkan anggaran pendapatan sebesar Rp1.307.154.121.966 dari anggaran pendapatan tersebut telah direalisasikan pendapatan sebesar Rp1.314.065.101.716, sehingga rasio efektivitas ditemukan sebesar 100,53%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat efektivitas pendapatan pemerintah daerah kabupaten Minahasa berada pada kategori sangat efektif.

Kemudian pada tahun 2017 anggaran pendapatan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.195.337.150.000 dari total anggaran pendapatan tersebut, realisasi anggaran pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp1.276.079.815.204, sehingga rasio efektivitas pada tahun 2017 adalah 106,75% atau berada pada kategori sangat efektif. Nilai rasio tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Pada tahun 2018 anggaran pendapatan adalah sebesar Rp1.240.173.197.898, anggaran mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2018 diperoleh

sebesar Rp1.267.974.996.960 dan diperoleh tingkat efektivitas pendapatan sebesar 102,24%. Nilai tersebut berada pada kategori sangat efektif, akan tetapi jika dibandingkan dengan tingkat efektivitas pendapatan tahun sebelumnya nilai rasio tersebut mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp1.332.541.938.509, nilai anggaran tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan diperoleh sebesar Rp1.300.024.724.183, sehingga tingkat efektivitas pendapatan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 97,56% atau berada pada kategori cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penjelasan diatas, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 – 2018 lebih tinggi dibandingkan anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2019 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan jika dilihat dari rasio efektivitas, kinerja dari pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan rasio efektivitas yang menunjukkan nilai yang semakin kecil sejak tahun 2018.

Dengan menurunnya rasio efektivitas, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengalami penurunan. Meskipun rasio efektivitas pendapatan cenderung berada pada kategori sangat efisien, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dapat dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik dalam meningkatkan pendapatan daerah karena rasio efektivitas pendapatan yang semakin menurun.

#### **4.3.2 Analisis Laporan Realisasi Anggaran dengan Menggunakan Rasio Efisiensi.**

Melalui analisis efisiensi dapat diketahui seberapa besar tingkat efisiensi dalam belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Perhitungan rasio efisiensi dilakukan untuk mengetahui jumlah realisasi belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dalam meningkatkan realisasi pendapatan. Tingkat efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan baik apabila rasio efisiensi menunjukkan nilai  $< 100\%$ .

Menurut hasil perhitungan, dapat dilihat pada tabel 4 rasio efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 dan 2018 menunjukkan nilai  $> 100\%$ , sehingga hal dapat diartikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa pada periode tersebut tidak efisien. Kemudian rasio efisiensi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2017 dan 2019 menunjukkan nilai  $< 100\%$ , sehingga hal dapat diartikan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa pada periode tersebut sudah efisien.

Pada tahun 2016 realisasi belanja pemerintah daerah Kabupaten Minahasa adalah sebesar Rp1.322.939.724.000 dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.314.065.101.716, sehingga rasio efisiensi ditemukan sebesar 100,68%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat efisiensi pendapatan pemerintah daerah kabupaten Minahasa berada pada kategori tidak efisien.

Kemudian pada tahun 2017 realisasi belanja daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi Rp1.272.422.425.685 kemudian realisasi anggaran pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp1.276.079.815.204, sehingga rasio efisiensi pada tahun 2017 adalah 99,71%. Nilai rasio tersebut

mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016. Meskipun rasio menunjukkan nilai  $< 100\%$  atau dapat dikatakan sudah efisien, akan tetapi nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena jumlah realisasi belanja hanya memiliki selisih yang kecil dengan realisasi pendapatan.

Pada tahun 2018 realisasi belanja adalah sebesar Rp1.273.130.917.962, realisasi tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan pada tahun 2018 diperoleh sebesar Rp1.267.974.996.960 dan diperoleh tingkat efisiensi kinerja keuangan sebesar 100,41%. Nilai tersebut berada pada kategori tidak efisien, jika dibandingkan dengan tingkat efisiensi kinerja keuangan tahun sebelumnya nilai rasio tersebut mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 realisasi belanja adalah sebesar Rp1.290.203.142.720, nilai realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Kemudian realisasi pendapatan diperoleh sebesar Rp1.300.024.724.183, sehingga tingkat efisiensi kinerja keuangan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 99,24%. Meskipun rasio menunjukkan nilai  $< 100\%$  atau dapat dikatakan sudah efisien, akan tetapi nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena jumlah realisasi belanja hanya memiliki selisih yang kecil dengan realisasi pendapatan.

Berdasarkan penjelasan diatas, realisasi belanja daerah yang digunakan Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 dan 2018 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Akan tetapi pada tahun 2017 dan 2019 realisasi belanja daerah yang digunakan Kabupaten Minahasa lebih rendah dari realisasi pendapatan yang diperoleh. Sedangkan jika dilihat dari rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa pada tahun 2016 –

2019 adalah tidak stabil, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai rasio yang naik turun.

Secara keseluruhan rasio efisiensi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa cenderung tidak efisien. Melihat hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dapat dikatakan memiliki kinerja keuangan yang kurang baik dalam mengelola belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, hal tersebut dikarenakan rasio efisiensi yang berada pada nilai  $> 100\% - 100\%$ .

#### **4.3.3 Pengendalian Internal pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa**

Melalui analisis efektivitas dan efisiensi pada tahun 2016 pemerintah daerah Kabupaten Minahasa, rasio efektivitas ditemukan sebesar 100,53%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat efektivitas pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa berada pada kategori sangat efektif. Rasio efisiensi ditemukan sebesar 100,68%. Nilai rasio tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2016 tingkat efisiensi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa berada pada kategori tidak efisien.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2016 telah terdapat pengendalian internal mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatannya. Akan tetapi pengendalian internal pemerintah kurang berjalan dengan maksimal karena tingkat realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan yang dimilikinya.

Kemudian pada tahun 2017 rasio efektivitas pada tahun 2017 adalah 106,75% atau berada pada kategori sangat efektif. Rasio efisiensi pada tahun 2017 adalah 99,71%. Meskipun rasio menunjukkan nilai  $< 100\%$  atau dapat dikatakan sudah efisien, akan tetapi nilai tersebut termasuk dalam kategori kurang efisien karena jumlah realisasi belanja hanya memiliki selisih yang kecil dengan realisasi pendapatan.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 telah terdapat pengendalian internal mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatannya. Pengendalian internal pemerintah juga berjalan dengan baik karena tingkat realisasi belanja daerah yang dikeluarkan lebih rendah dari pendapatan yang dihasilkannya.

Pada tahun 2018 tingkat efektivitas pendapatan sebesar 102,24%. Nilai tersebut berada pada kategori sangat efektif. Tingkat efisiensi kinerja keuangan sebesar 100,41%. Nilai tersebut berada pada kategori tidak efisien, jika dibandingkan dengan tingkat efisiensi kinerja keuangan tahun sebelumnya nilai rasio tersebut mengalami penurunan.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 telah terdapat pengendalian internal mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat realisasi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatannya. Akan tetapi pengendalian internal pemerintah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan tingkat realisasi

belanja daerah yang dikeluarkan lebih tinggi dari pendapatan yang dihasilkannya atau rasio efisiensi yang mengalami kenaikan.

Pada tahun 2019 tingkat efektivitas pendapatan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 97,56% atau berada pada kategori cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan realisasi pendapatan yang dicapai oleh pemerintah daerah lebih rendah dari anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Tingkat efisiensi kinerja keuangan pada tahun 2019 menunjukkan nilai 99,24%.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2019 telah terdapat pengendalian internal mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Pengendalian internal Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut dibuktikan dengan meskipun tingkat realisasi pendapatan yang dicapai pada tahun 2019 lebih rendah, tingkat realisasi belanja daerah yang dikeluarkan lebih rendah dari pendapatan yang dihasilkannya. Sehingga dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa telah melakukan pengendalian internal dengan maksimal karena pada tahun 2019 pemerintah daerah tidak dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan, akan tetapi pemerintah mampu menekan belanja daerah menjadi lebih kecil dari pendapatan daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa telah terdapat pengendalian internal mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Pengendalian internal telah dilakukan secara rutin untuk mengontrol realisasi anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mengacu dari hasil analisis laporan realisasi anggaran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan rasio efektivitas dan rasio efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa kurang berjalan dengan baik, karena rasio efektivitas pendapatan daerah mengalami penurunan dan rasio efisiensi kinerja keuangan cenderung menunjukkan kategori tidak efisien. Hal tersebut dikarenakan meski realisasi pendapatan daerah lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, akan tetapi realisasi pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tersebut lebih kecil dibandingkan belanja daerah. Sehingga realisasi pendapatan daerah yang telah dicapai kurang maksimal.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pemerintah daerah kurang mampu mengelola hasil pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa masih harus bergantung dengan Dana Pemerintah (DaPer). Berdasarkan keterangan diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam Laporan Realisasi Anggaran pada periode 2016 – 2019 telah berjalan efektif akan tetapi tidak efisien.
3. Telah terdapat pengendalian internal mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa. Pengendalian internal telah dilakukan secara rutin

untuk mengontrol realisasi anggaran, akan tetapi pengendalian internal belum dilaksanakan secara maksimal.

## 5.2 **Saran**

Berdasarkan analisis data penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan penulis antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa diharapkan dapat meningkatkan kinerja semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sehingga pemerintah dapat memaksimalkan realisasi pendapatan daerah dan meminimalisir kebutuhan belanja daerah. Dengan begitu diharapkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dapat meningkat.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti rasio kemandirian, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah periode pelaporan realisasi anggaran untuk dilakukan analisis, agar tingkat relevansi penelitian yang dicapai lebih tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukri dan Jhon Andra Asmar, 2006. Prilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah. Simposium Akuntansi Nasional IX, Padang.
- Afifah, N. (2010). Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.
- Azuar Juliandi, dkk (2015). Metodologi Penelitian Bisnis. Medan:UMSU PRESS
- Badan Pusat Statistik. (2016-2020). Kabupaten Minahasa dalam Angka Tahun 2016-2020. Retrieved Februari 28, 2021.
- Budiman, R. Y., & Wokas, H. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara.
- Budiyono, A. H. (2004). Pengantar Manajemen. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cenissa Sajow, dkk (2017) “Analisis realisasi anggaran belanja daerah pada pemerintah kota tomohon dan pemerintah kabupaten minahasa selatan”.
- Dien, A. J., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2016 - 2019). APBD dan Realisasi APBD. Retrieved February 1, 2021,
- Grace Yunita Liando, dkk. (2016). “Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten kepulauan sangihe”. (Jurnal EMBA Vol.4 No.1/Maret 2016).
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah (3rd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Julita, dkk (2016). Penganggaran Perusahaan. Bandung:Cita Pustaka Media

- Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol.5 No.2/Juni 2017). Eka Nurmala Sari, dkk.  
(2015). Akuntansi Sektor Publik. Medan:Perdana Publishing
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Mustika, M. (2016). Analisis Laporan Realisasi APBD Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010-2014.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Pailingan, A. F., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Kota Manado.
- Pemendagri No.56 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

